

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pakar politik terkemuka Mesir, Osama Ghozali al Harb, ada tiga titik balik perjalanan dalam sejarah politik modern di Mesir. Pertama, kemerdekaan dari kolonial Inggris pada tahun 1922 yang melahirkan negara monarki konstitusional. Kedua, meletusnya revolusi tahun 1952 yang mengakhiri sistem monarki dan lahirnya sistem republik pertama. Ketiga, usulan Presiden Mubarak mengamandemen Pasal Nomor 76 yang dianggap akan melahirkan republik kedua.¹

Masa sistem monarki konstitusional dan republik pertama memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan. Pada masa sistem monarki konstitusional (1922-1952), Mesir mengukir prestasi politik, ekonomi, budaya, dan sosial, seperti penanaman rasa nasionalisme, penerapan prinsip hak yang sama bagi semua warga, terciptanya persatuan nasional, pengenalan sistem multipartai dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat. Namun, kelemahan masa itu, menurut guru besar Universitas Cairo Professor Aladin al Hilal dalam bukunya Politik dan Pemerintahan di Mesir, adalah tiadanya komitmen menghormati prinsip-prinsip aturan main parlemen dari pihak Inggris, raja, partai-partai minoritas, serta buruknya penampilan Partai Wafad yang berkuasa saat itu.

¹ <http://kompas.com/kompas-cetak/0503/06/ln/1598092.htm> download tanggal 06 Maret 2005

Kelebihan pada masa republik kedua (1952- 2005) adalah telah tercipta keadilan sosial di Mesir dengan kembalinya hak-hak kaum petani dan pekerja melalui program reformasi tanah yang dicanangkan Presiden Gamal Abdel Nasser. Namun, kelemahan utama masa itu adalah tiadanya kehidupan demokrasi dengan dihapuskannya sistem multipartai dan diterapkan sistem partai tunggal (partai sosialis yang berkuasa pada masa Presiden Abdel Nasser).

Selama periode pemilu partai tunggal (1952-1972) kontrol oleh pemerintah sangatlah kuat.² Kandidat-kandidat yang maju dalam pemilu harus disaring/diuji loyalitas politiknya oleh pejabat-pejabat Free Offices yang mendominasi partai. Sejumlah pilihan kandidat alternatif diajukan, yang biasanya merupakan tokoh-tokoh lokal. Prestise pribadi dan asal-usul kandidat juga sangat mempengaruhi.

Pada tahun 1960-an, sistem konstituen dwi-anggota diterapkan, di mana satu dari dua kursi disediakan untuk kaum pekerja dan petani. Namun sistem ini secara umum tidak berhasil untuk mengantarkan kaum kelas bawah ke dalam proses pemilihan.³ Dimulai pada tahun 1976, Anwar Sadat mengizinkan adanya kompetisi antara tiga proto-partai dari pihak kiri, tengah dan kanan sebagai sebuah langkah maju menuju proses politik yang lebih terbuka. Calon independent juga diijinkan untuk ikut bersaing dalam pemilu. Pada pemilu

tahun 1979, dimana kandidat anti pemerintah yang ikut bersaing menentang

perjanjian damai dengan Israel mendapati rintangan berupa penghinaan dan kecurangan oleh pemerintah, menandakan sebuah langkah mundur bagi liberalisasi politik di Mesir.⁴

Presiden Anwar Sadat yang menggantikan Presiden Abdel Nasser pada tahun 1970 memberlakukan kembali sistem multipartai sejak tahun 1977 dan berlanjut hingga masa Presiden Mubarak saat ini. Namun, sistem multipartai tersebut masih jauh dari standar kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.

Saat ini, Mesir masih menerapkan pemilihan presiden dengan calon tunggal yang disepakati oleh parlemen. Partai Demokratik Nasional yang dipimpin Mubarak mendominasi majelis sejak partai politik kembali dipulihkan di tahun 1970an.⁵ Presiden Mesir dipilih parlemen dan kemudian nama presiden yang disetujui parlemen itu diajukan kepada rakyat untuk diminta persetujuan melalui referendum. Partai Nasional Demokrat (NDP) pimpinan Hosni Mubarak yang menguasai kursi di parlemen selama ini selalu mengajukan nama Hosni Mubarak sebagai calon tunggal dan berhasil memenangi pemilihan secara telak. Kemudian nama yang disetujui itu diajukan kepada rakyat melalui referendum, yang juga selalu mendapat dukungan lebih dari 90 persen suara.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, pemerintahan Presiden Mubarak, seperti halnya negara-negara dunia ketiga lainnya, menghadapi problem serius,

⁴ *Ibid*

⁵ <http://www.waspada.co.id/berita/international/artikel.htm> download tanggal 1 Maret 2005

seperti membengkaknya angka pengangguran, pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan, naiknya harga-harga bahan pokok, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta ancaman kaum militan.

Mubarak yang namanya bersinar sebagai panglima Angkatan Udara dalam Perang Arab-Israel tahun 1973, pada masa tahun pertama pemerintahannya juga menghadapi situasi regional yang cukup sulit, yaitu terisolasinya Mesir dari dunia Arab akibat perjanjian damai Camp David dengan Israel tahun 1979. Mubarak kemudian berhasil mengembalikan Mesir ke dunia Arab dan pindahnya lagi markas besar Liga Arab dari Tunisia ke Cairo.

Dalam proses damai dengan Israel, Mubarak berhasil mengembalikan sisa-sisa tanah di Gurun Sinai pada April 1982. Ia juga terus melanjutkan hubungan strategisnya dengan Amerika Serikat (AS) yang telah dirintis oleh pendahulunya, Presiden Anwar Sadat.

Dalam konteks ekonomi, Mubarak telah menerapkan reformasi ekonomi terbatas sejak pertengahan tahun 1980. Mubarak juga melakukan demokratisasi secara sangat terbatas pula dengan terus memperkuat sistem multipartai dan kebebasan pers maupun berpendapat. Namun, langkah demokratisasi yang dilakukan Mubarak masih menuai kritik dari kelompok oposisi dan independen karena jauh dari memadai. Hal ini disebabkan masih berjalannya undang-undang darurat dan dibatasinya gerak partai-partai politik.

Dalam konteks hubungannya dengan kelompok Islam di Mesir,

dengan kelompok Islam. Kelompok tersebut mengalami hubungan yang sangat buruk dengan pemerintah pada akhir masa jabatan Presiden Anwar Sadat yang tewas oleh kelompok Islam militan. Mubarak melepaskan tahanan tokoh-tokoh Islam yang dijebloskan ke penjara oleh Anwar Sadat. Ia juga membuka secara luas aktivitas dakwah dan menambah acara keislaman di radio dan televisi. Mubarak juga mengizinkan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang dilarang masuk parlemen bergabung dengan partai lain, seperti Partai Buruh. Motivasi pemerintahannya adalah mendapat dukungan dari semua segmen masyarakat Mesir, termasuk kelompok Islam, di tengah memburuknya situasi ekonomi, sosial, dan merajalelanya KKN.

Pemerintahan Mubarak dalam batas tertentu masih bersikap toleran atas tindakan kelompok Islam membredel buku-buku yang beraliran Islam liberal dan mengancam artis-artis yang dituduh mengabaikan moral serta budaya bangsa. Namun, pemerintahan Mubarak mulai bertindak tegas ketika kelompok Islam militan menyerang kawasan wisata dan para turis asing yang merupakan salah satu sumber utama devisa Mesir. Pemerintah pun memilih berkonfrontasi dengan kelompok Islam militan dan menangkap sejumlah tokohnya karena dianggap mengancam basis investasi di Mesir. Klimaks dari konflik pemerintah dan kelompok Islam militan adalah ketika terjadi percobaan pembunuhan atas Presiden Mubarak di Addis Ababa, Etiopia, Juni 1995. Maka, tantangan paling serius atas kekuasaan Mubarak adalah aksi kekerasan yang dilancarkan kelompok Islam militan pada era tahun 1990.

Meski kehidupan politik akan diperlonggar, kata Mubarak, dalam kasus-kasus penting "untuk mempertahankan ketertiban umum," kekuasaan darurat akan diberlakukan kembali. UU keadaan darurat di Mesir diberlakukan pada awal 1980-an setelah peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Ia tewas diberondong peluru senapan mesin saat menyaksikan parade militer di Kairo tahun 1981.

Hosni Mubarak kemudian mengusulkan pada parlemen, agar mengamandemen Pasal Nomor 76 dari Konstitusi Mesir untuk mengizinkan para calon berlomba dalam pemilu presiden melalui sistem pemilihan langsung dan rahasia. Melalui amandemen pasal itu, tak ada tempat sistem warisan di Mesir dan siapa pun dari warga Mesir harus melalui prosedur pemilu langsung kalau ingin mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Jamal Mubarak. Tentu terbuka pula bagi Jamal Mubarak menjadi presiden di masa mendatang apabila dikehendaki rakyat melalui pemilu langsung yang transparan dan demokratis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Mengapa Presiden Mesir Hosni Mubarak mengusulkan amandemen konstitusi pasal 76 tahun 2005 yang memungkinkan sistem multi calon dalam pemilu presiden di Mesir padahal selama berpuluh-puluh tahun sistem multi calon tidak ada?"

C. Kerangka Dasar Teori

Ada beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan pola berpikir dalam penelitian ini. Untuk menganalisa atau menjelaskan perilaku mengapa Presiden Husni Mubarak memutuskan untuk mengamandemen pasal 76 tahun 2005, penulis menggunakan beberapa teori yang memiliki tingkat-tingkat analisa yang berbeda.

Sesuai dengan kebutuhan akan keakuratan hipotesa, maka *range* analisa penelitian ini meliputi tingkat personal (individu) dan kelompok (sistem). Teori-teori yang berupaya menjelaskan perilaku dari sisi internal psikologis adalah Teori Psikologi Kognitif dan Teori Persepsi. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan motivasi pribadi Husni Mubarak dalam mengamandemen pasal 76.

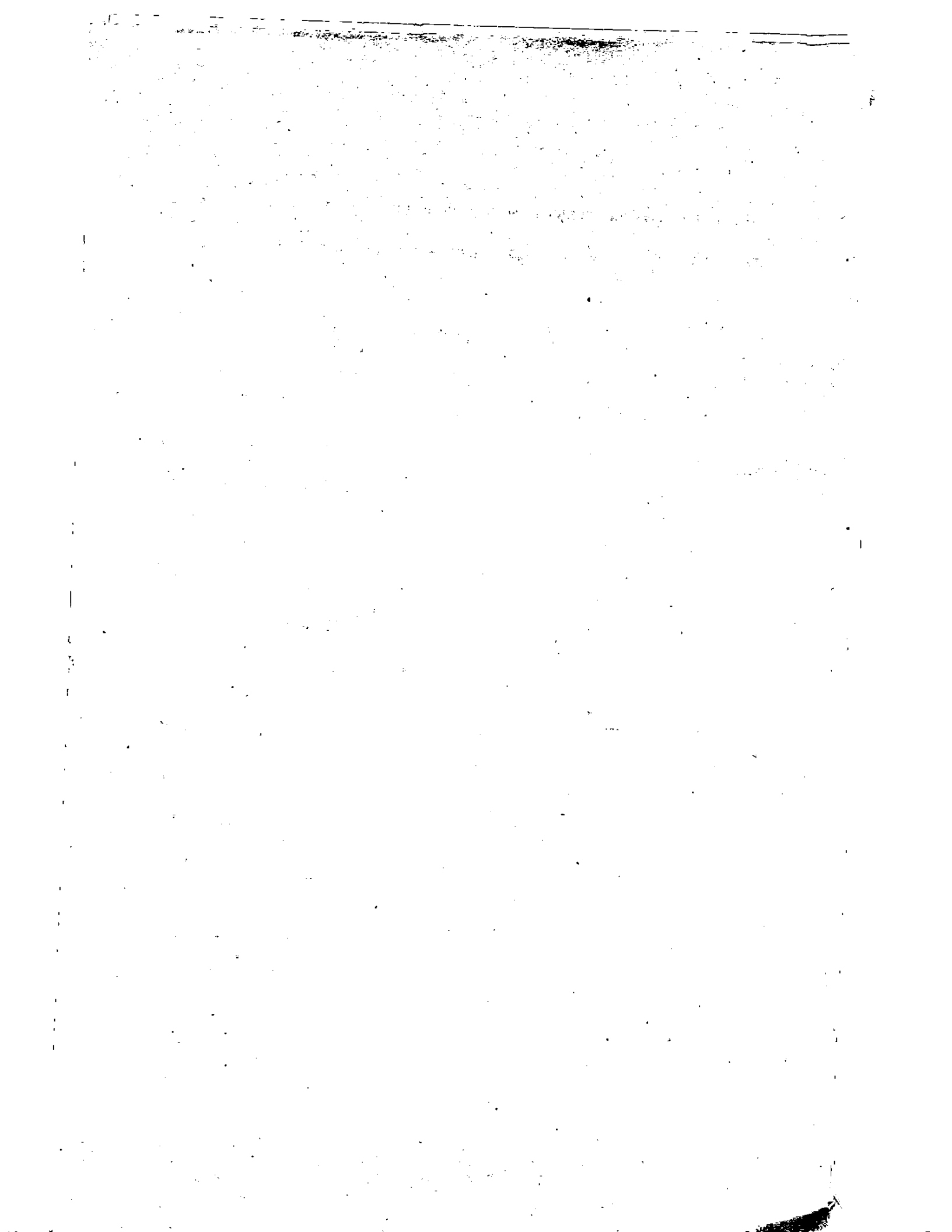
Sementara Teori Peranan (*The Role Theory*) merupakan teori yang berada di tingkat kelompok karena menghubungkan perilaku individu dengan institusi tempat ia berada. Selain itu, juga ditambahkan Konsep Gelombang Demokrasi untuk menegaskan konteks situasi yang sedang terjadi saat amandemen.

1. Teori Psikologi Kognitif

Menurut pendekatan psikologi kognitif, perilaku manusia (*behavior*) adalah hasil interaksi antara *person* (diri orang itu) dengan *environment* (lingkungan psikologisnya).⁶ Perilaku manusia bukan sekedar respons pada stimuli, tetapi produk berbagai gaya yang mempengaruhinya secara spontan.⁷ Teori ini dicetuskan oleh salah seorang psikolog Gestalt yaitu Kurt Lewin.

⁶ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985, hal. 27

⁷ *Ibid.*



2. Teori Persepsi

Menurut Kenneth Boulding, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia nyata itu mungkin berbeda.

Kita harus mengakui bahwa orang-orang yang menentukan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan ... tidak melakukan tanggapan terhadap fakta-fakta situasi yang "obyektif" ... tetapi "citra" mereka tentang situasi itu. Yang menentukan perilaku kita adalah persepsi kita tentang dunia, bukan kenyataan dunia.¹⁴

Jadi orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "ketahui." Tanggapan seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara orang memandang "kenyataan." Menurut **Teori Persepsi** yang dikemukakan oleh Ole R. Holsti, diasumsikan bahwa:

Persepsi selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam mengartikan situasi yang dihadapinya apakah situasi itu baik atau buruk, merupakan ancaman atau bukan dan lain-lain, juga mengandung keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar meskipun kebenaran tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁵

Berdasarkan dua teori di atas, dapat dijelaskan bahwa perilaku Husni Mubarak mengamandemen pasal 76 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kognitif yang ada dalam dirinya seperti kepercayaan (*belief*), persepsi (*perception*), dan *stereotyping*. Kognisi dalam dirinya tersebut telah

¹⁴ Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (PAU-UGM, 1989), hal. 19-20.

¹⁵ Ole R. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, (Third Edition Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977), hal. 367 dan 370

menimbulkan perubahan kepribadian terutama dalam hal kebijakan-kebijakannya,

Sebelum amandemen, Husni Mubarak cenderung bersikap konservatif dan mendukung *statu quo* dirinya. Namun perubahan kepribadian yang dipengaruhi oleh kognisi dalam dirinya mengharuskan Mubarak untuk mengambil langkah moderasi dalam menghadapi pemilu mendatang.

Seorang psikolog James Baldwin menyatakan bahwa paling sedikit ada dua bentuk peniruan, satu didasarkan pada kebiasaan kita dan yang lainnya didasarkan pada wawasan kita atas diri kita sendiri dan atas orang lain yang perilakunya kita tiru. Walau dengan teori yang berbeda seorang sosiolog Charles Cooley sepaham dengan pandangan Baldwin. Keduanya memfokuskan perhatian mereka kepada perilaku sosial yang melibatkan proses mental atas kognitif.¹⁶

Pada dasarnya teori perilaku menyatakan bahwa perilaku pemimpin negara paling baik dijelaskan melalui perilaku yang secara langsung dapat diamati dan lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut dapat berubah. Teori kognitif menjelaskan perilaku pemimpin negara dengan cara memusatkan pada bagaimana menyusun mental (pikiran, perasaan) dan memproses informasi yang datangnya dari lingkungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kepercayaan, stereotype, dan persepsi mengenai pimpinan Mesir, kedaulatan wilayah, dan segala hal mengenai Mesir yang ada

¹⁶ *Kedaulatan Rakyat*, 10 Juni 2003

di dalam diri seseorang Presiden Hosni Mubarak dapat mempengaruhi tipe dan sifat kebijakan yang diambilnya mengenai Mesir.

Hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV yang menjelaskan latar belakang, situasi politik dan persepsi Mubarak terhadap gerakan oposisi yang mempengaruhinya dalam mengambil kebijakan.

3. Teori Peranan

Teori kedua adalah **Teori Peranan** (*The Role Theory*) yang didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan pemimpin negara yang mempengaruhi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Terlepas dari profil psikologi seseorang, apabila dia memegang peranan yang spesifik, maka hasil perilakunya dimodifikasi oleh harapan atau ekspektasi publik terhadap perilaku tadi.¹⁷ Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson dimana pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada perilaku sosial tetapi juga merupakan alternatif lain yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran ataupun imajinasi dari pemimpin negara itu sendiri.¹⁸ Selain itu pengaruh partai politik juga menjadi basis dan latar belakang politik pimpinan negara.

Dalam konsep peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Baik posisi berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki

¹⁷ Anzar Sifudir, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995, hal 24

¹⁸ Hasan Mustafa, *Prespektif dalam Psikologi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hal 56

posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu. Konsep peran menegaskan bahwa "perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik" Konsep ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Dalam konsep peran ini, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya.¹⁹

Hosni Mubarak seperti diketahui berasal dari Partai Nasional Demokrasi (NDP), partai sayap kanan Mesir yang berkuasa sejak tahun 1981. Partai Nasional Demokrasi (NDP) selalu menguasai kursi di parlemen selama ini dengan mengajukan Hosni Mubarak sebagai calon tunggal dan berhasil memenangi pemilihan secara telak. Mesir menerapkan pemilihan presiden dengan calon tunggal yang disepakati oleh parlemen.

Partai Demokratik Nasional yang dipimpin Mubarak mendominasi majelis sejak partai politik kembali dipulihkan di tahun 1970an. Mubarak, yang sudah memerintah Mesir sejak tahun 1981 menyusul tewasnya Presiden Anwar Sadat dalam peristiwa pembunuhan, mengatakan ia telah meminta supaya Konstitusi Mesir diubah sebelum bulan Mei menjelang pemilu presiden mendatang. Kata Mubarak gagasan ini untuk membuka era baru reformasi, agar pemilu presiden Mesir tahun ini dilaksanakan secara bebas.

Menurut Rizal Panggabean bahwa kebijakan yang dicetuskan oleh seorang pemimpin negara sedikit banyak merupakan representasi kepentingan

¹⁹ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional*, PAU-SS UGM, Yogyakarta, 1989, hal 44

partai politik darimana pemimpin tersebut berasal. Hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin biasanya sejalan dengan atau tidak terlalu jauh melenceng dari "garis" partainya, khususnya bagaimana diterapkan dalam platform atau program partai.²⁰ Hosni Mubarak sendiri adalah pemimpin Partai Nasional Demokrasi, partai yang cukup konservatif.

4. Konsep Gelombang Demokrasi

Musim semi demokrasi yang sejak tahun 1990-an mekar masih berlangsung hingga awal abad 21 saat ini. Demokrasi tersebut melanda berbagai belahan benua di dunia, terutama sekali menerpa masyarakat negara-negara berkembang.²¹ Di Timur Tengah dan Afrika Utara, gerakan Islam di tahun 1990-an juga mulai melekatkan prosedur demokratis sebagai cara untuk mengelola kekuasaan. Di negara-negara muslim seperti Tunisia dan Mesir, gerakan oposisi Islam bahkan menganjurkan dilakukannya pemilu kompetitif secara terbuka.²²

Sampai akhir 1980-an, demokrasi telah mengambil karakteristik yang oleh Samuel P. Huntington disebut sebagai 'obat ajaib yang mujarab'.²³ Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan memberikan jaminan atas hak asai manusia serta kebebasan kepada masyarakatnya tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan. Huntington menyebutkan bahwa

²⁰ Rizal Panggabean, "Pemerintah Perwakilan", Yogyakarta : Fisipol UGM, 1998, hal 56

²¹ George Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in A Changing World*, Boulder: Westview Press, 1993, dalam John Markoff, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. xi

²² John Markoff, *Ibid.*, hal. 19

²³ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, (Norman: University of Oklahoma Press), 1991, hal. 113-4.

terjadinya proses transisi demokrasi dari rezim-rezim non demokratis dapat melalui 4 proses, yaitu:

1. *Transformasi* atau *Reforma*, di mana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi.
2. *Replacement* atau *Ruptura*, di mana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi.
3. *Transplacement* atau *Ruptforma*, di mana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan *bargaining* antara pemerintah dengan kelompok oposisi.
4. *Intervensi* yang jarang terjadi, yaitu di mana lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar.²⁴

Gelombang demokrasi sebetulnya telah dimulai pada tahun 70, 80 dan 90-an. Puncak dari gelombang demokrasi dunia adalah ketika angin politik dunia berbalik arah secara dramatis, yaitu pada tahun 1989 di mana rezim komunis runtuh yang kemudian disertai dengan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, mundurnya tentara Uni Soviet dari berbagai negara-negara satelitnya, pecahnya Uni Soviet menjadi berbagai negara yang merdeka dan hancurnya Pakta Warsawa sebagai monumen kekuasaan Blok Timur.²⁵ Gelombang demokrasi kemudian betul-betul menerpa masyarakat-masyarakat di seantero jagat dengan kencangnya.

²⁴ Samuel P. Huntington, *Ibid.*

²⁵ John Markoff, *op.cit.*, hal. ix

D. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Hosni Mubarak mengusulkan Amandemen konstitusi pasal 76 tahun 2005 dalam menghadapi pemilu presiden Mesir Tahun 2005 karena:

1. Adanya perubahan kepribadian Hosni Mubarak dan pandangannya terhadap kepemimpinan, kekuasaan dan resistensi.
2. Kuatnya peran Hosni Mubarak dalam Partai National Democratic Party
3. Adanya gelombang demokratisasi di Timur Tengah khususnya di Mesir

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana figur pribadi yang menjadi latar belakang karier politiknya membawa pengaruh bagi setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden Hosni Mubarak mengenai pemilu presiden yang akan diselenggarakan September 2005.
2. Mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sifat dan bentuk kebijakan yang diambil oleh Presiden Hosni Mubarak dalam menghadapi pemilu di Mesir.
3. Dalam menelaah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Hosni Mubarak saat ini memungkinkan kita untuk mengetahui seberapa besar prospek pemilu yang mungkin dicapai di Mesir.

F. Jangkauan Penelitian

Batasan topik dalam skripsi ini adalah gerakan reformasi politik Hosni Mubarak dalam menghadapi pemilu presiden di Mesir tahun 2005 yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta politik yang terjadi selama kepemimpinan Hosni Mubarak. Sedangkan jangkauan waktu obyek penelitian adalah sejak munculnya inisiatif reformasi oleh Hosni Mubarak, yaitu ketika Mubarak mensponsori konferensi Alexandria pada bulan Maret 2004 tentang reformasi di dunia Arab di gedung perpustakaan Alexandria hingga saat Mubarak mengusulkan amandemen konstitusi pasal 76 pada bulan Februari tahun 2005.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik studi literatur yang relevan dengan topik permasalahan yang diteliti. Adapun referensi yang digunakan berupa buku, berita dan artikel dalam surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal, serta data internet. Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain

